



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 066.2/Kep.259-Organisasi/2023**

**TENTANG
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023 - 2024**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan sasaran dan target reformasi birokrasi, perlu ditetapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 - 2024;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 264).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/98/RB.00/2023 Tanggal 28 Maret 2023 Hal Tindaklanjut Instansi Pemerintah atas Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024.
- KEDUA : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, yang terdiri dari:
- a. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah; dan
 - b. Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Tindaklanjut atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 - 2024 sebagaimana diktum KETIGA, disusun dan ditetapkan melalui Rencana Aksi Pembangunan RB General dan RB Tematik setiap tahunnya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai Koordinator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Purwakarta
- KELIMA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. *Strategic Transformation Unit (STU)* merupakan unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang merupakan organ pimpinan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan RG General dan RB Tematik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
- b. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) merupakan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pengampu ketercapaian indikator kinerja pelaksanaan RB General.
- c. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) merupakan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksanaan RB Tematik.
- d. Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal) terkait ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, untuk dijadikan bahan tindaklanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
- e. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh *Projeck Transformation Unit (PTU)* yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

KEENAM : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Mei 2023.

BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :
TAHUN 2023-2024

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
066.2/Kep. 259-organisasi/2023.
31 Mei 2023.
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL TAHUN 2023-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
	- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%	
	- Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%	
	Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%	
	Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%	
	Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
	Meningkatnya Pembangunan Tematik Kinerja	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

BUPATI PURWAKARTA

ANNE/RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :
TAHUN 2023-2024

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
066.2/Kep.259-organisasi/2023.
31 Mei 2023.
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023-2024

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan			Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024		Penanggungjawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100 %	100 %	100 %		Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	N/A	50%	75%		Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,28	2,50	2,60		Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Baik	Meningkat		Diskominfo	Seluruh PD
		Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Meningkat		Bappelitbangda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:	66,19	67,64	69,64			
		Perencanaan Kinerja	19,84	20,14	20,64		Bappelitbangda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	19,44	20,04	20,54		Bappelitbangda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	9,95	10,25	10,75		Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Evaluasi Internal	16,96	17,21	17,71		Inspektorat	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	565 layanan	566 layanan	566 layanan		DPMPTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	1 unit	2 unit	2 unit		Inspektorat	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan			Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024		Penanggungjawab	Pelaksana
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3		Setda (Bag. Adbang)	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	95,18%	100%	100%		Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	71,86	71,95	72,00		Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	50,00	50,00		Bappelitbangda	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	Baik	Naik		Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	69,45	70,00	73,00		Dinas Arsip dan Perpustakaan	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	3	4		Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	31,30	36,10	55		Setda (Bag. PBJ)	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP		BKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	79%	80%	80,5%		Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	95%	96%	97%		BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	50%	70%	75%		BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%		BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	241	250	251		BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	N/A	50	67,2		BKPSDM	Seluruh PD
		Employee Branding*	N/A	6	7,66		BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,28	87	88		Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggungjawab	Pelaksana
		Indeks Pelayanan Publik	4,08	4,2	4,3	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD

B. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023-2024

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan			Leading Sector
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	8,70%	7,48	7,25%		Bappelitbangda (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	82,83 Triliun	85 Triliun	93,32 Triliun		DPMPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	4,86%	2,89%	1,34%		Bappelitbangda (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Menurunnya angka Prevalensi Stunting yang didorong melalui optimalisasi implementasi transformasi digital	Prevalensi Stunting	21,8%	14%	12%		Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	53%	70%	75%		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Tim P3DN)

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 066.2/Kep.259-organisasi/2023.
TANGGAL : 31 Mei 2023.
TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023-2024

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023-2024

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Bobot Nilai	Leading Institution
1		2		3	4	5
A. Capaian Sasaran Strategis						
1 Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif						
a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah		1-5	7,00	Dinas Kominfo
b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja					
	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		0 - 100	7,00	Setda, Inspektorat, Bappelitbangda
	- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai (≤50%) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)		Level 1-5	4,00	Setda dan Bappelitbangda
c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan					
	- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti		0 - 100	2,00	Inspektorat
	- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya		0 - 100	1,00	BKAD
2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK		0 -100	7,00	BKPSDM
b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		1-5	7,00	Setda
c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPi 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM		Level 1-5	7,00	Inspektorat

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Bobot Nilai	Leading Institution
1		2		3	4	5
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB						
	a.	Tingkat maturitas SIPP	Nilai Implementasi SIPP Perangkat Daerah	1-5	2,00	Inspektorat
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjuti	0 -100	2,00	Dinas Kominfo
	c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 -100	2,00	Bappelitbangda
	d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 -100	2,00	Setda
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 -100	2,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 -100	2,00	Setda
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 -100	2,00	BKPSDM
C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General						
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal		Ya/ Tidak	1,00	STU
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (≤50%) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (>50%) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)		Level 1-4	3,00	STU
TOTAL BOBOT NILAI RB GENERAL PERANGKAT DAERAH					60,00	

B. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023-2024

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2		3	4	5
A. Strategi Pembangunan RB Tematik						
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);	Level 1 - 5	5,00	STU	
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	5,00	STU	
B. Capaian Dampak RB Tematik						
1.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib di penuhi oleh Seluruh Perangkat Daerah	0 - 100	5,00	STU & Tim P3DN	
2.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	1. Belum dilakukan digitalisasi administrasi untuk menyelesaikan isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0) 2. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi pemerintahan namun belum berpengaruh terhadap penyelesaian isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0,01 - 40,00) 3. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi namun masih sebagian permasalahan isu pembangunan yang diselesaikan < 50% (interval nilai 40,01 - 60,00)	Level 1 - 5	10,00	STU & Dinas Kominfo	

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2		3	4	5
		4. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan namun masih terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 60,01 - 80,00)				
		5. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan dan tidak terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 80,01 - 100,00)				
3.	Capaian Kinerja RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan/Peningkatan Investasi/Pengendalian Laju Inflasi/Isu Strategis Pembangunan Lainnya yang menjadi core bisnis	Data dan Informasi Capaian Kinerja RB Tematik yang disampaikan akan dibandingkan dengan data dan informasi dari eksternal seperti; data BPS, data publikasi pada media massa, dan sebagainya serta dari hasil reviu dan pendalaman yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Independen/Tim Penilai Independen		0 – 100	15,00	STU & Tim Independen
TOTAL BOBOT NILAI RB TEMATIK PERANGKAT DAERAH						
				40,00		

BUPATI PURWAKARTA,



 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 066.2/Kep. 259-organisasi/2023.
TANGGAL : 31 Mei 2023.
TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023-2024

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023-2024**

A. PENGARAH TIM REFORMASI BIROKRASI

Pengarah : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
Sekretaris Tim Pelaksana RB : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah

B. STRATEGIC TRANSFORMATION UNIT (STU)

Ketua STU : Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum
Kepala Pelaksana : Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Harian
Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Kesejahteraan Rakyat
2. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia,
Keuangan dan Administrasi
3. Sri Siti Saidah S.Sos., M.Kes., Analis Kebijakan Ahli
Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Purwakarta
4. Any Daningsih, S.IP., Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta
5. Roedi Hartono, S. Sos., M.AP., Analis Kebijakan Ahli
Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Purwakarta
6. Iman Santosa Ansyory, SH., Analis Kebijakan Ahli
Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Purwakarta

7. Ai Mahbubah, SP., M.Si., Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
8. Muhammad Roniri, SSTP., Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
10. Amalia Dewi, MKM., M.Med. Sc., P2UPD Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

C. PENANGGUNGJAWAB PENGAMPU INDIKATOR (LEADING INSTITUTION) PELAKSANAAN RB GENERAL

1. Koordinator Penanggungjawab : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. Penanggungjawab Indikator :

No	Kegiatan Utama	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Penanggung jawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ Transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:		
		Perencanaan Kinerja	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Evaluasi Internal	Inspektorat	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	DPMPSTP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Inspektorat	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Diskominfo	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Penanggung jawab	Pelaksana
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Bappelitbangda	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	DinasArsip dan Perpustakaan	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ)	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	BKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	BKPSDM	Seluruh PD
		Employeeer Branding*	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi))	Seluruh PD

D. KOORDINATOR PENGAMPU TEMATIK (LEADING SECTOR) PELAKSANAAN RB TEMATIK

1. Koordinator Pengampu : Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan

2. Leading sector RB tematik :

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Leading Sector	Pelaksana
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Bappelitbangda	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	DPMPTSP	Tim Percepatan Investasi Daerah
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	Bappelitbangda	Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Leading Sector	Pelaksana
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	Dinas Kesehatan	Tim Penanganan Stunting
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

3. TIM EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN RB PEMERINTAH DAERAH

Ketua Tim Evaluasi Internal : Inspektur Daerah Kabupaten Purwakarta
Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Ketua Pelaksana Harian : Irban Khusus
Anggota : 1. Saut Maruli Hutagaol, S.Kom.
2. Tita Sulastri, SH., MM.
3. Dina Yuliana, SE.
4. Desandra Nurul Fadhilah, S.IP.
5. Ai Herliani, S.KM., M.KM.
6. Neneng Susanti, SE

4. PEDOMAN PENYUSUNAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH (PROJECT TRANSFORMATION UNIT (PTU))

1. Ketua PTU : Kepala Perangkat Daerah
2. Pelaksana RB General :
 - Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah
 - Sekretaris : Kasubag TU/Kepegawaian Sekretariat PD
 - Anggota : 1. *(by name)*
2. *(by name)*
3. *Dst sesuai kebutuhan*
Merupakan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat Perangkat Daerah
3. Pelaksana RB Tematik :
 - Ketua : Kepala Bidang Teknis Terkait Tema yang diambil
 - Wakil Ketua : Kepala Bidang lainnya
 - Sekretaris : Kasubag Perencanaan Program pada Sekretariat Perangkat Daerah
 - Anggota : 1. *(by name)*
2. *(by name)*
3. *Dst sesuai kebutuhan*

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 066.2/154p.259-Organisasi/2023.
TANGGAL : 31 Mei 2023.
TENTANG : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023-2024

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
A	Pengarah Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi			
	1. Pengarah	Memberikan Arahan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Menetapkan Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Memastikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan.
	2. Penanggungjawab Pelaksana RB	Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level Pemerintah Daerah	Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik level Pemerintah Daerah	1. Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General dan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah 2. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Pemerintah Daerah kepada Tim Evaluasi Nasional pada Bulan Oktober setiap tahunnya;
	3. Koordinator Pelaksana RB General	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab	Menetapkan Strategi Pelaksanaan RB General level Pemerintah Daerah dan level Perangkat Daerah	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General telah dilaksanakan secara sistemik,

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		indikator kinerja (<i>leading institution</i>) dalam pelaksanaan RB General		komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
	4. Koordinator Pelaksana RB Tematik	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan tematik (<i>leading sector</i>) dalam pelaksanaan RB Tematik	Menetapkan Strategi Pelaksanaan RB Tematik level Pemerintah Daerah dan level Perangkat Daerah	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
	5. Sekretaris Tim Pelaksana RB	Memberikan dukungan administrasi (tata usaha, keuangan maupun sarana dan prasarana) pelaksanaan tugas <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Menetapkan dukungan administrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Memastikan dukungan administrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dapat terpenuhi.
B. <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>				
	1. Ketua STU	Mengkoordinasikan pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Menyelesaikan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan persoalan (<i>debotlenecking</i>) yang dihadapi oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
	2. Ketua Pelaksana Harian dan Anggota <i>Strategic</i>	1. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi;	1. Menetapkan strategi operasional pelaksanaan kebijakan reformasi	1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Pemerintah Daerah kepada

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
	<i>Transformation Unit (STU)</i>	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan advokasi dan internalisasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi kepada seluruh perangkat daerah; Menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; Mengkoordinasikan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> birokrasi pada level pemerintah daerah; Menetapkan Rencana Aksi Pemerintah Daerah Pelaksanaan RB General dan RB Tematik; dan Menetapkan Nilai Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Pelaksana RB setiap 6 (enam) Bulan dan kepada Tim Evaluasi Nasional setiap Bulan Oktober; Menyampaikan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Pelaksana RB setiap 6 (enam) Bulan; Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Internal ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada <i>leading institution</i> dan <i>leading sector</i> untuk dijadikan bahan tindak lanjut dalam penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik; dan Mengkomunikasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
C	Penanggungjawab Pengampu Indikator RB	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General; 	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General; 	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB General Pemerintah Daerah sesuai indikator

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
	General (<i>Leading Institution</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Tahunan; Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB General sesuai dengan indikator yang diampu; Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; dan Menyusun dan menetapkan rencana aksi tindaklanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal. 	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General sesuai indikator yang diampu setiap Tahunnya; Menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General sesuai indikator yang diampu berdasarkan hasil Evaluasi Tim Evaluasi Internal; dan Menetapkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu. 	<ol style="list-style-type: none"> yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU); dan Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).
D	Koordinator Pelaksana RB Tematik (<i>Leading Sector</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan pelaksanaan tematik yang ditetapkan dalam RB Tematik; Menyusun dan melaksanakan identifikasi permasalahan sesuai tema yang ditetapkan dalam RB Tematik; Menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja RB Tematik; 	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB Tematik; Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik sesuai tema yang diampu setiap Tahunnya; Menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB Tematik sesuai indikator yang diampu berdasarkan hasil Evaluasi Tim Evaluasi Internal; 	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB Tematik Pemerintah Daerah sesuai tema yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		4. Menyusun kerangka kerja (<i>logical framework</i>) pelaksanaan RB Tematik yang ditetapkan;	4. Menetapkan pembagian peran dan tanggungjawab perangkat daerah untuk melaksanakan intervensi pelaksanaan kebijakan RB Tematik; dan	
		5. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik; dan	5. Menetapkan bersama <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai tematik yang diampu.	
		6. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) pelaksanaan RB Tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB Tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.		
E	Tim Evaluasi Internal	1. Melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah; dan	1. Menetapkan rekomendasi perbaikan hasil evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah	1. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).
		2. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rekomendasi Perbaikan Ketercapaian Indikator Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah.		
F	<i>Projeck Transformation Unit (PTU)</i>	1. Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah;	1. Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah;	1. Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana indikator pelaksanaan RB General;
		2. Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB	2. Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB	

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		<p>General dan RB Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya;</p> <p>3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik di seluruh unit kerja;</p> <p>4. Melaksanakan penilaian mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan</p> <p>5. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjuti (RATL) Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.</p>	<p>Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya;</p> <p>3. Menetapkan Nilai hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan</p> <p>4. Menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjuti (RATL) Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.</p>	<p>2. Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana tema pelaksanaan RB Tematik;</p> <p>3. Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level perangkat daerah sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan</p> <p>4. Menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada <i>Strategic Transformation Unit (STU), Leading Institution dan Leading Sector.</i></p>

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Mei 2023.

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA